

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kota pada hakikatnya adalah suatu tempat yang akan berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan potensi yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang serta memunculkan permasalahan yang kompleks pula. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik. Dalam perubahan dan perkembangan kota, para perencana kota diharapkan mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya (Catanesi & Snider, 1988). Seperti halnya dengan kota-kota lain, kota Bandung memiliki sesuatu yang baik dan perlu dipertahankan atau dipelihara.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerah masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan daerah, setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia seakan berlomba-lomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktifitas masyarakat umum serta sebagian besar berpengaruh terhadap penataan ruang di suatu kota. Seperti di kota Bandung begitu banyak peraturan daerah yang mengatur mengenai permasalahan diatas, salah satunya

Peraturan daerah No 11 tahun 2005 mengenai penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di kota Bandung.

Peraturan Daerah kota Bandung No 11 Tahun 2005 yang telah mengalami perubahan atas peraturan daerah Kota Bandung No 3 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) sangat erat kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi kota Bandung, mulai dari masalah sampah, banjir, kemacetan dan lain-lain menjadikan efektivitas perda sangat diharapkan dapat menciptakan lingkungan hidup kota Bandung yang lebih ramah dan sejuk. Pemberlakuan Perda No 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan ini mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedisiplinan warga kota Bandung serta sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No 11 Tahun 2005 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) sudah resmi diundangkan pada tanggal 8 April 2005 dan efektif berlaku April tahun 2006. Perda ini menggantikan Perda Nomor 6 Tahun 1995 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. ada 67 butir kegiatan masyarakat Bandung yang diatur lengkap dengan sanksinya. Diantaranya adalah ketentuan untuk menyeberang jalan, naik/turun kendaraan umum, penggunaan jalan, membuang sampah, pemasangan portal/polisi tidur dan lain-lain. Sanksi per jenis pelanggaran berupa denda dan pidana kurungan. Denda administrasi bervariasi dari Rp 250 ribu hingga Rp 50 juta. Sedangkan sanksi pidana adalah kurungan paling lama 3 bulan. Sebagai contoh, setiap pengguna jasa angkutan umum yang naik/turun tidak pada tempat

pemberhentian yang telah ditetapkan akan dikenai denda maksimal Rp 250 ribu, sedangkan mendirikan tempat untuk kegiatan perjudian dapat diganjar denda Rp 50 juta. Merokok pada 'tempat yang salah', diancam sanksi hingga Rp 5 juta.

Permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang terjadi di Kota Bandung dapat dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang yang tidak sesuai lagi dengan fungsinya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pengemis dan pengamen yang menggunakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat tinggal sementara, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyebrang jalan sembarangan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa setiap kota harus memiliki luas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. Adanya kelengkapan infrastruktur yang seimbang dan harmonis dalam pengelolaan lingkungan wilayah perkotaan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang konsisten merupakan tujuan utama penerapan sistem pembangunan berkelanjutan.

Mengingat begitu pentingnya keterkaitan antara penyelenggaraan K3 terhadap pelaksanaan tata ruang di kota Bandung, maka keefektifitasan Perda ini patut diperhitungkan. Salah satu contohnya berbicara mengenai masalah pengelolaan sampah yang masih ada kaitannya dengan kebersihan di Kota

Bandung, jumlah penduduk di Kota Bandung setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, hal ini berpengaruh pula terhadap kepadatan dan peningkatan aktifitas penduduk, maka secara tidak langsung volume sampah yang dihasilkan pun akan mengalami peningkatan padahal persentase pengangkutan sampah di Kota Bandung rata-rata baru mencapai 60%. Hal ini dapat terlihat berdasarkan presentasi PD.Kebersihan kota Bandung pada tahun 2008.

**Tabel 1.1**  
**Presentasi Pengangkutan Sampah di Kota Bandung pada Tahun 2008**

<b>Sumber Timbunan</b>	<b>Timbunan Sampah (m/hari)</b>	<b>Terangkut (m/hari)</b>
Pemukiman	3978	3063
Pasar	613	459
Jalan	449	295
Industri	787	366
Usaha komersial	312	168
Fasilitas umum	1361	184
<b>Jumlah</b>	<b>7.500</b>	<b>4.535</b>

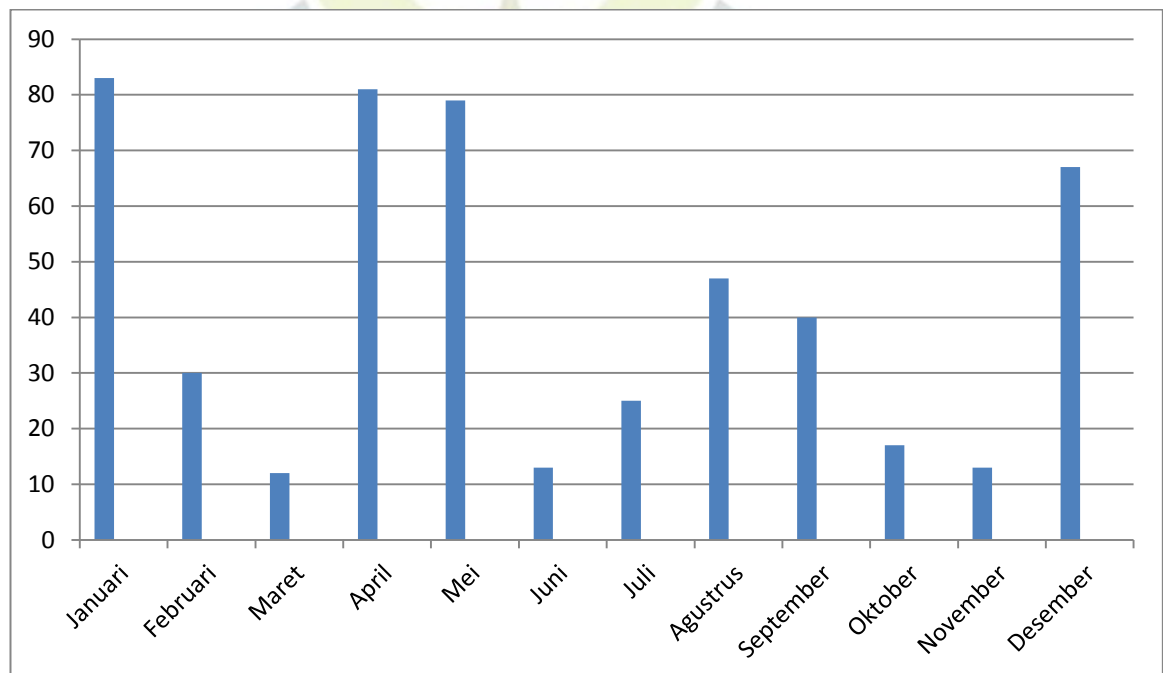
*Sumber : data hasil perhitungan oleh PD.Kebersihan kota Bandung pada tahun 2008*

Berbicara ketertiban, keindahan dan kebersihan kota Bandung tidak terlepas dari permasalahan kompleks yaitu pengelolaan sampah, penertiban PKL, pembangunan-pembangunan sektoral serta penataan taman kota.

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) merupakan persoalan klasik yang selalu terjadi di setiap kota besar, tidak terkecuali Kota Bandung, keberadaannya di satu sisi merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain menjadi masalah yang penanganannya sangatlah kompleks dan rumit. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan Pedagang kaki lima di Kota Bandung. Meskipun sudah

ditetapkan dalam Perda No 11 tahun 2005, tetapi hal ini untuk memperkuat bahkan bisa berkolaborasi, artinya penanganan PKL tidak hanya melalui perda K3 tetapi secara kongkrit dilapangan melauai tahapan dimulai pendekatan, pembinaan dan penataan. Berikut tabel mengenai hasil penegakan Perda K3 terhadap penataan PKL di kota Bandung pada tahun 2009.

**Gambar 1.1**  
**Hasil penegakkan Perda K3 terhadap penataan PKL Tahun 2009**  
**Kota Bandung**



*Sumber : Laporan Akhir Tahun Bagian Penyelidikan Satpol PP Kota Bandung 2009*

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung setiap tahun semakin berkurang. Hal tersebut disebabkan terjadinya perubahan fungsi yang semula berupa lahan terbuka menjadi terbangun untuk berbagai keperluan seperti perumahan, industri, pertokoan, kantor, dan lain-lain. Semakin sempitnya atau

kurang memadainya RTH. Taman kota yang merupakan salah satu komponen utama RTH memiliki peran penting sebagai sarana pembangunan sosial budaya seperti, pendidikan masyarakat, katup pengaman dan pengkayaan budaya kota, tempat berbagai aktivitas sosial masyarakat, pembentuk citra dan *image* kota, tempat utilitas dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat.

Jumlah dan luas taman di Kota Bandung dari zaman kolonial sampai dengan masa kemerdekaan pada tahun 1982, tidak begitu banyak berubah. Perkembangan taman yang cukup pesat terjadi sejak tahun 1983 sampai 1995, yaitu mencapai 200% (Megantara, 1995), dari 165 buah bertambah menjadi 503 buah. Namun demikian perkembangan jumlah taman tersebut tampaknya kurang berimbang dengan penambahan total luasnya yang hanya naik sekira 31%, yaitu dari 58 ha menjadi 76 ha. Sementara itu, jumlah taman baru yang dibangun umumnya berukuran kecil. Dari 503 taman pada tahun 1995, hanya 258 buah yang dapat disebut sebagai taman dalam arti sebenarnya, karena sisanya 245 buah hanya berupa jalur hijau tepi/pemisah dan simpang (di tengah) atau pulau jalan.

Data yang dikeluarkan Dinas Pertamanan Kota Bandung 2002, menyebutkan bahwa jumlah taman pada tahun 2002 lebih sedikit daripada data Megantara (1995) yaitu 487 buah. Namun demikian, total luasnya meningkat dari 76 ha menjadi 117,84 ha.

Masih banyak permasalahan yang muncul di kota Bandung mengenai penataan tata ruang yang harus dibenahi, bukan hanya tugas yang berat bagi pemerintah daerah tetapi menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh warga Bandung. Terciptanya suatu tata kelola yang baik bergantung pada system kebijakan yang

diterapkan oleh suatu daerah. Seperti Perda No 11 tahun 2005 mengenai penyelenggaraan K3 di Kota Bandung masih banyak yang perlu dibenahi, bukan hanya sekedar penetapan maupun peraturan yang terkandung di dalamnya, tetapi yang lebih penting adalah proses sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemberlakuan Perda tersebut. Jika hingga sekarang masih ada masyarakat Kota Bandung yang belum mengetahui keberadaan Perda K3, tentunya sangat disayangkan. Artinya, sosialisasi masih belum maksimal. Padahal ini Perda yang istimewa dan sangat penting diketahui oleh semua masyarakat Bandung karena berhubungan erat dengan aktivitas kita sehari-hari. Masalah pengelolaan lingkungan wilayah perkotaan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang konsisten merupakan suatu landasan yang dapat menciptakan penataan tata ruang yang harmonis tidak terjadinya lagi kesemrawutan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Mengenai Ketertiban,Kebersihan Dan Keindahan (K3) Terhadap Efektivitas Penataan Ruang Di Kota Bandung.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) terhadap penataan tata ruang kota

Bandung dipengaruhi oleh berbagai factor yang muncul salah satunya aktifitas yang semakin tidak tertib.

2. Dalam pelaksanaan kebijakan Perda No 11 tahun 2005 bukan hanya aspek infrastruktur yang menjadi tolak ukur pemberlakuan perda tersebut tetapi seluruh komponen pendukung harus ditata secara baik agar dapat berjalan efektif sehingga akan berdampak pula pada tata ruang kelola kota Bandung kearah yang lebih baik lagi.
3. Terciptanya suatu tata kelola yang baik bergantung pada system kebijakan yang diterapkan oleh suatu daerah. Bukan hanya sekedar penetapan maupun peraturan yang terkandung di dalamnya, tetapi yang lebih penting adalah proses sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemberlakuan Perda tersebut. bahkan hingga sekarang masih ada masyarakat Kota Bandung yang belum mengetahui keberadaan Perda K3, tentunya sangat disayangkan. Artinya, sosialisasi masih belum maksimal. Bukan itu saja masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tanpa menghiraukan sanksi-sanksi yang berlaku.
4. Tidak semua pegawai di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya khususnya di bidang yang berkaitan langsung dalam menangani masalah tersebut merasa puas dengan adanya penetapan Perda K3, karena pelaksanaan Perda K3 harus didukung oleh sluruh aspek tidak hanya terpaku pada pegawai di Dinas Tersebut.



5. Dukungan terhadap peningkatan sumber daya lingkungan masih kurang, ditandai dengan masih kurangnya dukungan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung dari aspek pemanfaatan maupun pemeliharaan,
6. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di kota Bandung.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Seberapa besar pengaruh komunikasi kebijakan K3 terhadap efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh sumber daya kebijakan K3 terhadap efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh disposisi kebijakan K3 terhadap efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh struktur birokrasi kebijakan K3 terhadap efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi secara simultan terhadap efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung?

### **1.4 Tujuan**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi kebijakan K3 terhadap penataan tata ruang kota Bandung.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber daya kebijakan K3 terhadap penataan tata ruang kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Disposisi kebijakan K3 terhadap penataan tata ruang kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh struktur birokrasi kebijakan K3 terhadap penataan tata ruang kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi secara simultan terhadap efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis, bahwa penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dan menginterpretasikan data agar memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai implementasi Perda No 11 Tahun 2005 mengenai penyelenggaraan ketertiban, keindahan dan kebersihan (K3) terhadap keefektifan penataan tata ruang di Kota Bandung.
2. Manfaat Teoritis, diharapkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan sumbangan konsep teoritis dalam pembangunan wilayah melalui penerapan Perda No 11 Tahun 2005 mengenai penyelenggaraan K3. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi terkait dengan pengembangan tata ruang di kota Bandung.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambahkan wawasan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menganalisis

suatu fenomena administrasi dan membandingkan dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya.

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Fokus dan lokus terhadap suatu sasaran dalam memecahkan masalah yang dikemukakan peneliti, diperlukan adanya suatu anggapan dasar atau kerangka pemikiran yang berupa dalil, hukum, teori serta pendapat dari para ahli yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Berkaitan dengan topik yang peneliti ajukan, maka peneliti mengemukakan pengertian yang berpedoman kepada pendapat para ahli.

Menurut pendapat dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip oleh Solihin Abdul Wahab (2001:65) dalam bukunya : Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara sebagai berikut:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut pendapat Carl Fredrich mengenai kebijakan dalam Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, yang dikutip oleh Solihin Abdul Wahab (2001:3) mengemukakan sebagai berikut "Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Menurut George C. Edward III yang dikutip oleh Widodo dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (1980:79), mengemukakan beberapa model yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.
2. Sumber daya, sumber daya itu dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya : sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya informasi, dan juga sumber daya kewenangan
3. Disposisi atau sikap, merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan
4. Struktur Birokrasi, mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Kebersihan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, penyakit, dan lain lain, yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat. Dan sebagaimana di ketahui bahwa kehidupan manusia sendiri tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam

maupun lingkungan sosial. Maka sebagai individu harusnya segala aspek yang ada dalam masyarakat harus dapat menjaga kebersihan lingkungan. Karena tanpa lingkungan yang bersih setiap individu maupun masyarakat akan menderita sebab sebuah faktor yang merugikan seperti kesehatan. Kesehatan itu begitu mahal harganya. Sehingga semuanya harus di olah dengan baik . Lingkungan yang kotor berarti pengganggu kesehatan yang juga berarti membuat bibit penyakit.

Herbet Read merumuskan bahwa “ keindahan adalah kesatuan dan hubungan-hubungan bentuk yang terdapat diantara pencerapan-pencerapan indrawi manusia.” Adapula pengertian keindahan menurut Teori estetika keindahan adalah Jean M. Filo dalam bukunya “*Current Concepts of Art*” dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu :

1. Kelompok yang berpendapat bahwa keindahan itu subjektif adanya yakni karena manusianya menciptakan penilaian indah dan kurang indah dalam pikirannya sendiri. Barangkali pernah juga kita dengar pepatah “*Des Gustibus Non Est Disputandum*” selera keindahan tak bisa diperdebatkan.
2. Kelompok yang berpendapat bahwa keindahan objektif adanya, yakni karena keindahan itu merupakan nilai yang intrinsik ada pada suatu objek, artinya seekor kupu-kupu memang lebih indah dari pada seekor lalat hijau.
3. Kelompok yang berpendapat bahwa keindahan itu merupakan pertemuan antara yang subjektif dan yang objektif, artinya kualitas keindahan itu baru ada apabila terjadi pertemuan antara subjek manusia dan objek substansi. Ada tiga hal yang nyata ketika seseorang menyatakan bahwa sesuatu itu indah, apabila ada

keutuhan (*Integrity*) ada keselarasan (*Harmony*) serta kejelasan (*Clarity*) pada objek tersebut. Ini biasanya disebut sebagai hukum keindahan.

Sedangkan menurut Sondang P Siagian bahwa efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Menurut Hidayat ( 1986 ) Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai berikut “ruang adalah Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan “Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan serta memelihara kelangsungan hidupnya.” Sedangkan menurut D.A.Tisnaamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang

merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Penataan ruang dilakukan berdasarkan, 1). Fungsi utamanya, meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. 2). Aspek administratif, meliputi ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi dan Wilayah Kabupaten. Menurut M. Daud Silalahi salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 UUPA memuat wewenang untuk:

- (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam konsep penataan tata ruang kota banyak sekali elemen-elemen yang mempengaruhi. Elemen tata ruang kota adalah salah satu unsur penting yang ikut menentukan perkembangan dari sebuah kota, sehingga peletakan dan pemanfaatannya harus benar-benar diperhatikan. Elemen tata ruang kota adalah wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang yang direncanakan maupun



tidak. Kondisi sosial maupun ekonomi sangat terkait erat dengan penataan ruang kota, pengelolaan lingkungan, dan sumber daya alam yang ada. Dalam penataan kota, ada beberapa unsur atau elemen yang menjadi pembentuk dalam tatanan kota tersebut, Rinaldi Mirsa (50,2012) dalam bukunya mengenai elemen tata ruang kota menjelaskan elemen-elemen tersebut sangatlah berpengaruh terhadap poladan bentuk Elemen Tata Ruang Kota. Adapun elemen-elemen tersebut diantaranya :

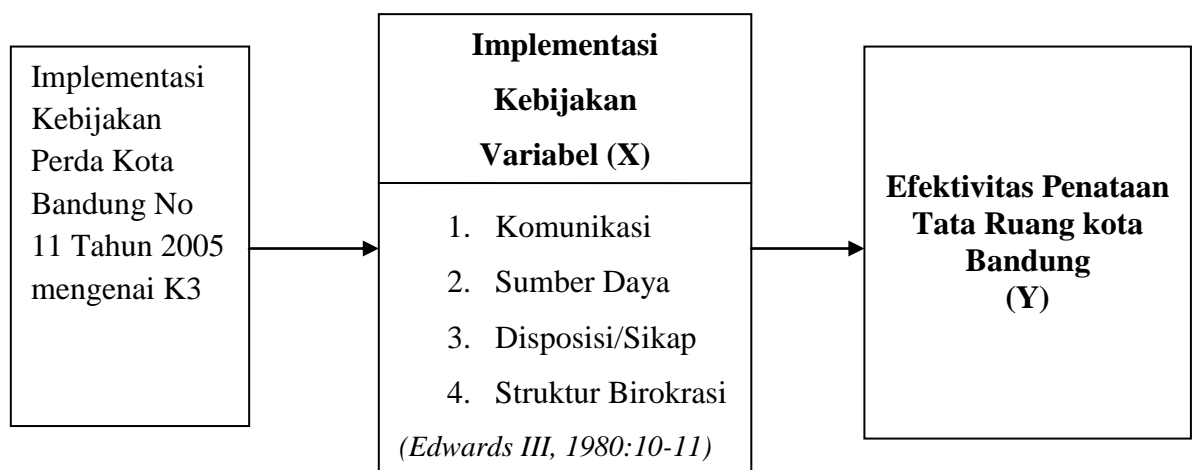
1. soid (bangunan)
2. Vilod (Ruang terbuka)
3. Lingkage (Jalur/jalan)

Ketiga elemen dasar ini sebagai unsur pembentuk kawasan kota sekaligus yang berfungsi sebagai wadah suaru aktifitas adalah elemen *Solid* yang bersifat massif, sedangkan *void* adalah *open spacel* ruang terbuka dan *lingkage* adalah jejalur/jalan yang merupakan jaringan yang menghubungkan antarfungsi utama atau antarfungsi kegiatan yang membenruk struktur kota.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mengemukakan paradigma penelitian, sebagaimana pada gambar berikut :

**Gambar 1.2**

**Pengaruh Implementasi Kebijakan Mengenai K3 (Ketertiban,Kebersihan dan Keindahan) Terhadap Efektivitas Penataan Ruang di Kota Bandung**





## 1.7 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2011:70) adalah ;

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut “ Adanya pengaruh dari pelaksanaan kebijakan mengenai K3 terhadap penataan tata ruang di Kota Bandung”.

Skala pengukuran untuk kedua variable adalah likert, dan dicari korelasinya dengan menggunakan koefisien Rank Sparman, adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut :

1. a.  $H_0 : \rho_s \leq 0$  = pengaruh komunikasi ( $X_1$ ) Efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung (Y), Artinya pengaruh komunikasi terhadap efektivitas penataan tata ruang di Kota Bandung tidak terdapat pengaruh yang signifikan  
 b.  $H_1 : \rho_s > 0$  = Pengaruh komunikasi ( $X_1$ ) efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung (Y), Artinya pengaruh komunikasi terhadap efektivitas penataan tata ruang di Kota Bandung terdapat pengaruh yang signifikan.
2. a.  $H_0 : \rho_s \leq 0$  = pengaruh sumber daya ( $X_2$ ) Efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung (Y), Artinya pengaruh sumber daya terhadap efektivitas penataan tata ruang di Kota Bandung tidak terdapat pengaruh yang signifikan  
 b.  $H_1 : \rho_s > 0$  = Pengaruh sumber daya ( $X_2$ ) efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung (Y), Artinya pengaruh sumber daya terhadap efektivitas penataan tata ruang di Kota Bandung terdapat pengaruh yang signifikan.

3. a.  $H_0 : \beta_s \leq 0$  = pengaruh disposisi ( $X_3$ ) Efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung (Y), Artinya pengaruh disposisi terhadap efektivitas penataan tata ruang di Kota Bandung tidak terdapat pengaruh yang signifikan  
 b.  $H_1 : \beta_s > 0$  = Pengaruh disposisi ( $X_3$ ) efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung (Y), Artinya pengaruh disposisi terhadap efektivitas penataan tata ruang di Kota Bandung terdapat pengaruh yang signifikan.
4. a.  $H_0 : \beta_s \leq 0$  = pengaruh struktur birokrasi ( $X_4$ ) Efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung (Y), Artinya pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas penataan tata ruang di Kota Bandung tidak terdapat pengaruh yang signifikan  
 b.  $H_1 : \beta_s > 0$  = Pengaruh struktur birokrasi ( $X_4$ ) efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung (Y), Artinya pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas penataan tata ruang di Kota Bandung terdapat pengaruh yang signifikan.
5. a.  $H_0 : \beta_s \leq 0$  = pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (X) Efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung (Y), Artinya pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektivitas penataan tata ruang di Kota Bandung tidak terdapat pengaruh yang signifikan  
 b.  $H_1 : \beta_s > 0$  = Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (X) efektivitas penataan tata ruang di kota Bandung (Y), Artinya pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektivitas penataan tata ruang di Kota Bandung terdapat pengaruh yang signifikan.